

**Strategi KPU Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019**

**Strategy from Bogor Regency KPU in Increasing Voter's Participation in the 2019 General Election**

**Triana Pertiwi<sup>a,1\*</sup>, Siti Rahmawati<sup>b,2</sup>**

<sup>a,b</sup> Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor, Indonesia

<sup>1</sup> wiezy3110@gmail.com\*; <sup>2</sup> sitirahmawatiipb@gmail.com

\*korespondensi penulis

<b>Informasi artikel</b>	<b>ABSTRAK</b>
Sejarah artikel: Diterima : Revisi : Dipublikasikan :	Partisipasi masyarakat dalam politik yang mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam Pemilu. Tingkat partisipasi Pemilu yang rendah merupakan tanda yang kurang baik karena pemerintah dianggap hanya melayani kepentingan beberapa kelompok. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, berperan sebagai fasilitator antara calon dan pemilih berkewajiban untuk menjamin akses informasi serta kebutuhan informasi masyarakat, sehingga perlu memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal dalam meningkatkan partisipasi pemilih, memformulasikan alternatif-alternatif strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal serta menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Bogor. Metode penelitian menggunakan analisis matriks IFE, matriks EFE, matriks IE, SWOT dan QSPM sebagai tahap keputusan akhir. Penelitian menghasilkan strategi utama yang dapat diimplementasikan, yaitu menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya.
<b>Kata kunci:</b> Komisi Pemilihan Umum Partisipasi Pemilih Strategi	<b>ABSTRACT</b> <i>Strategy of The General Election Commission (KPU) of Bogor Districts in Raising The Voters Participation on General Election 2019. The citizen's participation in politics that can be measurable is the citizen's behavior in the election. The low level of participation is considered as an unfavourable sign that the government only serves the interest of some groups. The General Election Commission (KPU) as the election conventions plays a critical role as the facilitator between the candidates and the voters, they have to ensure the access of information and all the society's information necessities. Therefore, it needs to have the right strategy in raising the voters participation. The purpose of this research is to identify factors of the internal and external environments in raising the voters participation, to formulate the alternative strategies based on the internal and external factors and to define the right strategy that can be implemented by The General Election Commission (KPU) of Bogor districts. The research methodology uses analysis of the IFE matrix, EFE matrix, IE matrix, SWOT and QSPM as the final decision the research resulting the main strategy that can be implemented, which is composing decisions the technique of election convention that is customized with Bogor district condition which based on the rules of regulations.</i>
<b>Keywords:</b> General Election Commission Election Participation Strategy	

Copyright © 2018 Triana Pertiwi, dkk. All Right Reserved

**Pendahuluan**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan *conditio sine quanon* (syarat mutlak) bagi

suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat. Dalam konteks manusia sebagai individu warga negara, maka Pemilu berarti proses penyerahan sementara hak politiknya. Hak tersebut adalah hak berdaulat untuk turut serta menjalankan penyelenggaraan negara (Budiardjo 2010). Suatu bentuk partisipasi politik yang mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih (Verba dan Nie dalam Budiardjo, 2010).

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menggunakan Pemilu sebagai sarana siklus pergantian pemimpinnya. Pasca reformasi, pada tahun 2004 masyarakat Indonesia dapat memilih partai politik beserta kandidatnya sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden secara langsung. Selain itu, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diaturlah Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri (UUD 1945). Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdiri secara hierarki, yaitu KPU sebagai lembaga penyelenggara tingkat nasional, KPU/KIP Provinsi penyelenggara tingkat provinsi serta KPU/KIP Kabupaten/Kota penyelenggara di tingkat kabupaten/kota.

Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah pemilih terbesar di Provinsi Jawa Barat bahkan di tingkat nasional. Pelaksanaan Pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bogor merupakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bogor, yang salah satu kewajibannya adalah memutakhirkan data dan daftar pemilih serta menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bogor kepada masyarakat. Sejak tahun 2004 hingga 2018 KPU Kabupaten Bogor telah melaksanakan dan menyelenggarakan beberapa periode Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor dengan tingkat partisipasi pemilih.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Pemilih

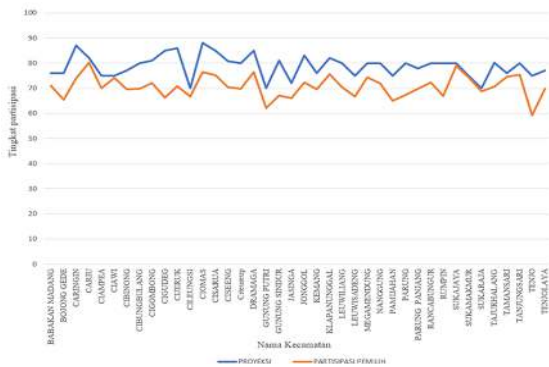
No	Jenis Pemilu/ Pemilihan	Tahun Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih Terdaf- tar	Penggu- na Hak Pilih	Persentase Pengguna Hak Pilih
1.	Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota	2004	2.545.479	2.127.455	83,58%
2.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Putaran 1/P1)	2004	2.586.378	2.156.763	83,39%
3.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Putaran 2/P2)	2004	2.559.953	2.088.622	81,59%
4.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat	2008	2744303	1767501	64,41%
5.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (Putaran 1/P1)	2008	2.800.701	1.775.009	63,38%
6.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor (Putaran 2/P2)	2008	2.810.462	1.634.647	58,16%
7.	Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota	2009	2.860.585	2.113.904	73,90%
8.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2009	3.023.543	2.414.409	79,85%
9.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat	2013	3340002	2086948	62,48%
10.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor	2013	3.190.543	2.008.165	62,94%
11.	Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota	2014	3.231.372	2.421.667	74,94%
12.	Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	2014	3.318.924	2.527.318	76,15%
13.	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor (Pemilihan Serentak)	2018	3.374.610	2.358.564	69,89%

Gambar 1. Tingkat partisipasi pemilih



Tingkat partisipasi pada pemilihan terakhir, yaitu Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, menurun sekitar tujuh persen dibandingkan dua Pemilu sebelumnya pada tahun 2014, jika dibandingkan dengan pemilihan sejenis, tingkat partisipasi pemilih tahun 2018 cenderung meningkat, tetapi masih lebih rendah dari target nasional serta proyeksi KPU Kabupaten Bogor yang disusun pada masa persiapan pemilihan. Berdasarkan Renstra KPU Tahun 2015-2019 partisipasi pemilih seharusnya dapat mencapai 77,5%, dan menurut target KPU Kabupaten Bogor tingkat partisipasi pemilih dapat mencapai 78%.

Gambar 2. Tingkat partisipasi pemilih Pemilihan Tahun 2018 terhadap targetnya



Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena ditafsirkan banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan adanya penilaian bahwa pemerintah hanya melayani kepentingan beberapa kelompok akibat pemerintah yang kurang tanggap karena pendapat (suara) masyarakat yang tidak dikemukakan (Budiardjo 2010). Pemilu maupun pemilihan merupakan ruang dialektika antara masyarakat dengan calon pemimpinnya, proses dimana para calon pemimpin memberikan visi, misi dan

program serta masyarakat yang hendak menyampaikan harapan yang ingin diwujudkan dan penyelesaian terhadap permasalahannya. KPU harus dapat menjadi fasilitator dan menyederhanakan proses dialektika tersebut, menjamin akses informasi serta kebutuhan informasi masyarakat agar masyarakat terbangun kesadarannya untuk mau menggunakan hak pilihnya melalui Pemilu (Kurniawan dan Haikal, 2016).

KPU Kabupaten Bogor sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bogor juga memiliki peranan tersebut, menjadi fasilitator dan menjamin akses informasi agar masyarakat Kabupaten Bogor memiliki kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya sehingga target tingkat partisipasi pemilih dapat tercapai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Terlebih lagi, setelah pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2018 ini, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kabupaten Bogor akan menghadapi Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sekaligus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada hari yang sama. Pemilu ini sangat penting, selain sebagai siklus pergantian pemimpin, tingkat partisipasi Pemilu yang tinggi dapat menjamin legitimasi pemerintahan yang kuat karena masyarakat turut serta secara langsung dalam menentukan para pemimpinnya di perlemen serta presiden sebagai kepala negara. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Bogor perlu memiliki strategi untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019, dengan menganalisis keadaan lingkungan internal dan eksternal saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor 2018 sebagai pelaksanaan program kegiatan yang berkesinambungan.

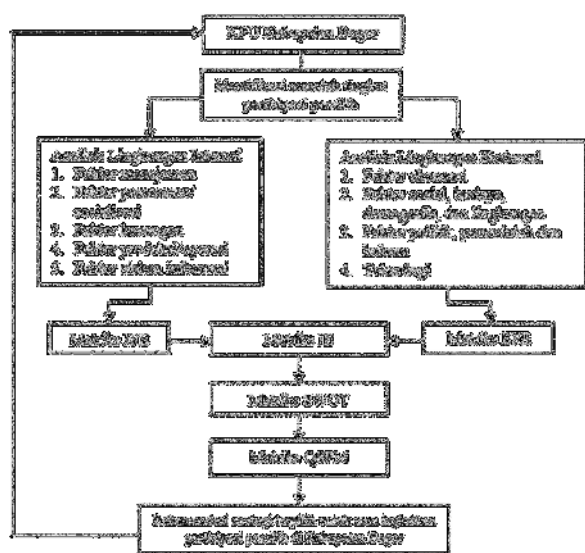
Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apa saja yang menjadi faktor lingkungan internal dan eksternal pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018 yang dapat menjadi upaya dalam meningkatkan partisipasi Pemilu 2019? (2) Bagaimana memformulasikan alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih berdasarkan faktor lingkungan internal-eksternal tersebut? (3) Bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019? Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun

2018 yang dapat menjadi upaya dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Tahun 2019; (2) Memformulasikan alternatif-alternatif strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal yang sesuai agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih; (3) Menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh KPU Kabupaten Bogor untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019.

**Metode**

Metode penelitian Strategi KPU Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kerangka Pemikiran



Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 35 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Waktu penelitian dilakukan mulai Agustus hingga September 2018. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode nonprobability sampling dengan pertimbangan tertentu (purposive sampling) sehingga memerlukan kriteria khusus agar sampel sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan nilai yang lebih representatif. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data yang digunakan adalah data primer diperoleh langsung melalui observasi, wawancara dan kuesioner yang diisi oleh sampel yaitu, Komisioner KPU Kabupaten Bogor dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bogor dan sumber sekunder diperoleh melalui literatur ataupun studi pustaka yang

bersumber dari buku, data laporan internal KPU Kabupaten Bogor, jurnal, skripsi, dan situs internet Pemda Bogor, KPU, BPS, tribunnews, freddyrangkuti.wordpress.com, dan statistikian.com. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap pengumpulan data (input stage) dengan menganalisis faktor lingkungan internal dan eksternal melalui matriks IFE dan EFE; (2) tahap pencocokan (matching stage) dengan matriks IE dan SWOT; (3) tahap pengambilan keputusan (decision stage) dengan matriks perencanaan strategi kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM).

**Hasil dan pembahasan**

*Tahap pertama* adalah dengan melakukan identifikasi terhadap faktor lingkungan, yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi faktor lingkungan internal, dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki KPU Kabupaten Bogor dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih Pemilu 2019 yang meliputi aspek manajemen, pemasaran/sosialisasi, keuangan, produksi/operasi. Sedangkan, tahap identifikasi lingkungan eksternal berfokus pada kejadian di luar kendali organisasi yang dapat menjadi peluang (opportunity) serta ancaman (threat) dengan tujuan mengembangkan sejumlah kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman yang sebaiknya dihindari. Faktor eksternal yang diidentifikasi pada KPU Kabupaten Bogor meliputi faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, demografi dan lingkungan, kekuatan politik, pemerintah, dan hukum, serta faktor kekuatan teknologi. Faktor ini dapat menjadi input yang terukur dalam perumusan strategi dengan menentukan skor untuk setiap faktor kekuatan-kelemahan serta peluang-ancaman. Skor diperoleh dari hasil perkalian nilai bobot dengan rata-ran rating dalam matriks IFE dan EFE sebagaimana terdapat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2. Perhitungan skor kekuatan pada Matriks IFE

Kode	Faktor Internal	Nilai Bobot	Rataan Rating	Skor
S1	Penyusunan program dan anggaran sudah memiliki dasar peraturan yang berlaku secara nasional	0,061	3,8	0,234
S2	Mengadopsi rancangan anggaran serta program kegiatan pada pemilihan sebelumnya menghemat waktu perencanaan	0,045	3	0,136
S3	Rata-rata pendidikan anggota KPU adalah S2 dan berpengalaman sebagai penyelenggara serta didukung oleh pegawai sekretariat yang 90% berstatus sebagai ASN vertikal dengan masa kerja lebih dari 7 tahun	0,045	3,2	0,145
S4	Adanya KAK dan SOP untuk pelaksanaan program kegiatan	0,055	3,4	0,187
S5	Staffing pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalamannya yang sesuai dengan bidangnya	0,055	3,4	0,187
S6	Pegawai dapat memberikan masukan atau pendapat saat rapat dengan putusan tertinggi tetap pada kesepakatan anggota KPU melalui Rapat Pleno	0,051	3,2	0,166
S7	Program sosialisasi disusun berdasarkan segmentasi pemilih dan dilakukan secara tatap muka atau melalui media masa cetak dan elektronik (termasuk media sosial) yang didukung oleh alat peraga sosialisasi seperti baliho, spanduk, poster, dan souvenir (boneka maskot, mug, payung, dan lainnya)	0,058	3,2	0,186
S8	Sumber dana berasal dari dana hibah yang besarnya sesuai dengan program kegiatan yang diajukan KPU dalam RAB	0,055	3,4	0,187
S9	Pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat dengan sistem 1 pintu melalui PPID	0,058	3,2	0,186
S10	Penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi (seperti: Silon, Situng, Sidalih) mempermudah KPU dalam mengolah, menampilkan serta melaporkan data kegiatan	0,052	3	0,155
<b>Total</b>				<b>1,769</b>

Tabel 3. Perhitungan skor kelemahan pada Matriks IFE

Kode	Faktor Internal	Nilai Bobot	Rataan Rating	Skor
W1	Kurangnya inovasi program kegiatan yang disusun dalam perencanaan karena keterbatasan waktu penyusunan sehingga mengadopsi program pada pemilihan sebelumnya	0,048	2,2	0,107
W2	Keterbatasan jumlah SDM untuk melaksanakan program dan jadwal Pilkada serentak yang juga berhimpitan dengan tahapan Pemilu 2019	0,055	2,2	0,121
W3	Tenaga pendukung rata-rata fresh graduate dengan minimnya pengalaman sebagai penyelenggara	0,038	2	0,077
W4	Pengambilan keputusan yang kadang tertunda karena syarat jumlah minimal anggota untuk rapat pleno dan mengambil keputusan tidak terpenuhi	0,045	1,8	0,081
W5	Keadaan lingkungan internal yang tidak kondusif karena komunikasi yang kurang efektif antara staf dengan atasan serta rendahnya motivasi	0,058	2,4	0,139
W6	Tidak meratanya kewajiban penggunaan KAK dan SOP sebagai dasar pelaksanaan teknis kegiatan untuk semua bidang	0,0517	2	0,103
W7	Kegiatan sosialisasi tatap muka masih tersentral di ibu kota kabupaten dengan jumlah peserta yang terbatas	0,0517	2	0,103
W8	Pelayanan PPID yang masih lambat karena birokrasi (banyak formulir yang wajib diisi) serta ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis	0,055	2,2	0,121
W9	Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala proses <i>maintenance</i> dari pengelola pusat	0,058	2,2	0,128
<b>Total</b>				<b>0,983</b>
<b>Total Matriks IFE (Kekuatan &amp; Kelemahan)</b>				<b>2,752</b>

Hasil penghitungan matriks IFE menunjukkan total skor faktor strategis internal sebagai kekuatan adalah 1,769 dan total skor kelemahan sebesar 0,983. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bogor memiliki kekuatan yang lebih dibanding kelemahannya serta total nilai matriks IFE 2,752 (>2,5) juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bogor secara internal

berada di posisi yang baik. Kekuatan utama terdapat pada penyusunan program dan anggaran sudah memiliki dasar peraturan yang berlaku secara nasional dengan skor 0,234. Peraturan yang berlaku secara nasional mempermudah KPU Kabupaten Bogor dalam menyusun setiap program kegiatan pelaksanaan tahapan serta anggaran, kuatnya dasar hukum, serta keseragaman dasar pemberlakuan anggaran melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Kekuatan berikutnya dengan skor 0,187 adalah adanya KAK dan SOP untuk pelaksanaan program kegiatan, staffing pegawai dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian serta pengalamannya yang sesuai dengan bidangnya, dan sumber dana berasal dari dana hibah yang besarnya sesuai dengan program kegiatan yang diajukan KPU dalam RAB. KAK dan SOP disusun sebagai dasar teknis pelaksanaan kegiatan tahapan sehingga pelaksanaannya lebih terkontrol.

Faktor yang menjadi kelemahan utama adalah keadaan lingkungan internal yang tidak kondusif karena komunikasi yang kurang efektif antara staf dengan atasan serta rendahnya motivasi dengan skor 0,139. Pelaksanaan kegiatan tahapan yang padat dan saling berhimpitan serta terbatas waktu seharusnya diperkuat dengan koordinasi yang baik terutama di lingkungan intern KPU Kabupaten Bogor itu sendiri. Tetapi hal tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan, baik dalam hubungan vertikal (atasan-bawahan) maupun horizontal (antar pimpinan/antar staf pelaksana). Seperti misalnya, rapat persiapan pelaksanaan atau evaluasi program kegiatan yang tidak dihadiri oleh pejabat dan/atau staf pelaksana terkait, mengalami deadlock sehingga rapat dapat dilakukan berulang-ulang untuk membahas hal yang sama, pembahasan suatu masalah melalui media komunikasi sosial (whatsapp) bukan duduk bersama dan berdiskusi secara langsung (tatap muka), instruksi yang timpang tindih, perlakuan pimpinan yang berbeda terhadap subbagian satu dengan subbagian lain, serta kurangnya pengakuan atas kerja dan upaya staf pelaksana dalam melakukan pekerjaan. Faktor kelemahan berikutnya adalah penggunaan sistem informasi yang sering terkendala proses maintenance dari pengelola pusat dengan skor 0,128. Sistem informasi yang berbasis online memerlukan proses maintenance yang terkadang memakan waktu cukup lama, sedangkan output dari sistem informasi yang digunakan ini adalah sebagai salah satu instrumen pengambilan keputusan

(penyajian data sesuai dengan formulir dalam Peraturan KPU) sehingga perlu dibuat kembali output yang sama dengan cara manual disamping tahapan dalam sistem informasi yang tetap harus dilaksanakan, karena digunakan sebagai sarana monitoring KPU RI dan KPU Provinsi atas kegiatan KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada serta sumber informasi masyarakat. Keterbatasan jumlah SDM untuk melaksanakan program dan jadwal Pilkada serentak yang juga berhimpitan dengan tahapan Pemilu 2019 dan pelayanan PPID yang masih lambat karena birokrasi (banyak formulir yang wajib diisi) serta ketersediaan data yang tidak tersimpan rapi dan sistematis merupakan faktor kelemahan lainnya dengan skor 0,121.

Identifikasi selanjutnya adalah terhadap lingkungan eksternal KPU Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam matrik EFE yang menunjukkan peluang (opportunity) serta ancaman (treat) sebagaimana tabel 4 dan 5.

Tabel 4. Perhitungan skor peluang pada Matriks EFE

Kode	Faktor Eksternal	Nilai Bobot	Rataan Rating	Skor
O1	Antusiasme pemilih pemula	0,054	3,2	0,172
O2	Partisipasi pemilih perempuan yang semakin baik	0,057	3,2	0,182
O3	Masyarakat urban yang memiliki pemikiran terbuka terhadap kehidupan bernegara terutama termasuk penggunaan haknya suaranya	0,051	3	0,152
O4	Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi	0,054	3,2	0,172
O5	Banyak tumbuhnya komunitas dan organisasi yang memudahkan KPU untuk memperluas segmentasi sasaran penyampaian informasi pemilihan	0,054	3,4	0,183
O6	<b>Pelaksanaan pemilihan dijamin dan diatur oleh Undang-Undang dan peraturan lainnya</b>	<b>0,057</b>	<b>3,8</b>	<b>0,216</b>
O7	Penguatan peraturan dengan juknis dan surat edaran dari KPU RI dan KPU Provinsi	0,053	3,4	0,183
O8	<b>Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya</b>	<b>0,057</b>	<b>3,4</b>	<b>0,194</b>
O9	<b>Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas</b>	<b>0,057</b>	<b>3,6</b>	<b>0,205</b>
<b>Total</b>				<b>1,659</b>

Tabel 5. Perhitungan skor ancaman pada Matriks EFE

Kode	Faktor Eksternal	Nilai Bobot	Rataan Rating	Skor
T1	Tingkat kesibukan dan pertimbangan untung-rugi masyarakat akan persepsi bahwa ber-partisipasi dalam pemilihan tidak memberi keuntungan apa-apa	0,051	3	0,152
T2	Laju pertumbuhan dan perpindahan yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis	0,053	3,2	0,172
T3	Kesenjangan sosial di lingkungan masyarakat yang menimbulkan apatis satu golongan tertentu	0,044	2,4	0,106
T4	Tidak meratanya infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, terutama wilayah per-batasan dan daerah dengan kontur pegunungan	0,050	3	0,152
T5	Kekhawatiran akan maraknya organisasi yang tumbuh akan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai alat politik untuk menghambat jalannya proses pemilihan	0,037	2,6	0,099
T6	Prioritas masyarakat akan tradisi dibanding mengurus kehidupan bernegara (seperti: lebih memilih berlibur dibanding pergi ke TPS)	0,047	2,6	0,123
T7	Juknis dan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi sering berbatas dengan waktu akhir tahapan	0,057	3,4	0,194
T8	Perubahan peraturan dan penerbitan kebijakan atas peraturan/keputusan sebelumnya dapat dinilai sebagai lemahnya konsistensi ketegasan hukum pelaksanaan pemilihan	0,057	3,8	0,216
T9	Kemajuan teknologi informasi memungkinkannya penyebaran berita/informasi hoax sulit dibendung	0,057	3,6	0,205
T10	Teknologi berbasis aplikasi yang memudahkan pekerjaan akan menimbulkan ketergantungan serta menurunkan pemahaman mengenai tahapan pengolahan data secara manual	0,051	3	0,152
<b>Total</b>				1,571
<b>Total Matriks EFE (Peluang dan Ancaman)</b>				3,231

Hasil penghitungan matriks EFE menunjukkan total skor faktor strategis eksternal sebagai peluang adalah 1,659 dan total skor ancaman sebesar 1,571. Hal ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bogor memiliki peluang yang lebih baik untuk mengurangi ancaman yang ada di lingkungan eksternal. Total nilai matriks EFE adalah 3,231 (>2,5) juga menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Bogor secara eksternal berada di posisi yang baik.

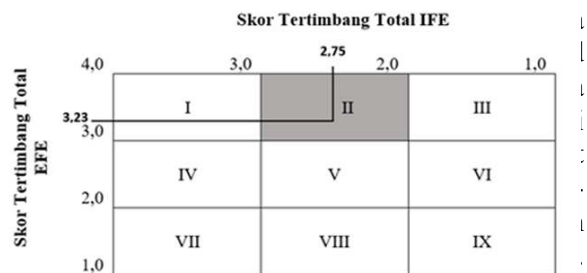
Peluang utama dari analisis lingkungan eksternal, yaitu pelaksanaan pemilihan dijamin dan diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya dengan skor 0,216. Faktor ini menjadi peluang karena dapat menambah kepercayaan masyarakat bahwa pelaksanaan pemilihan memiliki kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan juga menjamin hak dan kewajiban penyelenggara, peserta, serta pemilih, sehingga pelaksanaan setiap kegiatan dapat terukur (akuntabel), adil dan proporsional. Hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Faktor peluang kedua dengan skor 0,205 adalah teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas. Teknologi informasi berupa media sosial dapat menyebarkan informasi tentang pemilihan dalam waktu yang singkat kepada berbagai lapisan masyarakat sehingga sangat terbuka peluang masyarakat mendapat informasi yang cukup untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya adalah faktor peluang terbesar ketiga dengan skor 0,194. Pelaksanaan pemilihan merupakan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, tetapi pada pelaksanaannya KPU tidak dapat berdiri sendiri, dukungan pemerintah daerah dan jajaran muspida lainnya sangat dibutuhkan. Pemerintah daerah sangat mendukung dalam penyediaan dana, gedung dan fasilitas lainnya, melakukan kegiatan pendukung program-program KPU, membantu KPU bersinergi dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait, pemerintah tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Jajaran muspida seperti kepolisian menjamin keamanan selama pelaksanaan tahapan pemilihan, kejaksaan dan pengadilan memberikan pendampingan hukum sebagai langkah preventif dalam penanganan masalah pemilihan. Senergi yang baik antara KPU Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah serta jajaran Muspida lainnya dapat menjamin pelaksanaan pemilihan yang kondusif.



Faktor yang menjadi ancaman utama yaitu perubahan peraturan dan penerbitan kebijakan atas peraturan/keputusan sebelumnya dapat dinilai sebagai lemahnya konsistensi ketegasan hukum pelaksanaan pemilihan dengan skor 0,216. Selama pelaksanaan pemilihan, dasar hukum terutama Peraturan KPU sering mengalami perubahan, baik penambahan ataupun penghapusan atas suatu pernyataan peraturan. Faktor ancaman berikutnya dengan skor 0,205 adalah kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran berita/informasi hoax sulit dibendung, hal ini mengakibatkan masyarakat menerima informasi yang salah dan membentuk persepsi yang ambigu mengenai berita/informasi tentang pemilihan, misalnya berita hoax mengenai kurangnya surat suara di beberapa TPS yang tersebar melalui broadcast media sosial sehingga banyak masyarakat yang akhirnya mengurungkan niat memberikan suara di TPS pada hari pencoblosan. Ancaman selanjutnya dengan skor 0,194 adalah juknis dan surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi sering berbatas dengan waktu akhir tahapan, seperti syarat pendaftaran rekrutmen panitia adhoc yang tidak dapat mendaftarkan diri kembali jika sudah dua periode dalam jabatan yang sama. Hal ini mengakibatkan menurunnya jumlah pendaftar dan tidak mencukupinya quota pendaftaran. KPU RI dan KPU Provinsi menerbitkan surat edaran untuk menerangkan kebijakan atas syarat tersebut, tetapi surat edaran itu belum dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat karena berbatas waktu dengan jadwal penutupan rekrutmen panitia adhoc itu sendiri.

Hasil analisis matriks IFE dengan nilai 2,75 dan EFE dengan nilai 3,23, menunjukkan posisi KPU Kabupaten Bogor sebagai organisasi untuk menyusun bentuk strategi yang sesuai dengan keadaan lingkungan internal dan eksternalnya melalui matrik IE.

Gambar 4. Analisis matriks IE Berdasarkan matriks IE KPU Kabupaten Bogor



Optimisasi pemilu sebagai sasaran program dapat diperluas sebagai bentuk pengembangan

pasar serta sarana penyampaian informasi dan sosialisasi dikemas lebih menarik yang disesuaikan dengan sasarannya. Sedangkan strategi integratif yang dapat dilakukan yaitu integrasi ke depan (forward integration), integrasi ke belakang (backward integration). Integrasi ke depan dijalankan untuk meraih kendali atas alur penyampaian informasi dari atas hingga alur terbawah. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan agen-agen sosialisasi. Integrasi ke belakang dilakukan untuk memperoleh kewenangan dan meningkatkan kendali yang dapat dilakukan dengan cara mempersiapkan prosedur atau standar pelaksanaan kegiatan yang akan digunakan oleh agen-agen sosialisasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

**Tahap kedua** adalah formulasi alternatif strategi berdasarkan analisis posisi KPU Kabupaten Bogor. Tahap ini menggunakan matriks SWOT.

Gambar 5. Analisis matriks IE

Faktor Internal	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10	W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9
Peluang (Opportunity)	<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>
O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8, O9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap perpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya</li> <li>Menyusun program-program penyampaian informasi dan sosialisasi yang lebih inovatif dengan memanfaatkan keberadaan komunitas dan organisasi masyarakat sebagai agen sosialisasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sinergi di lingkungan internal serta mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran muspida lainnya</li> <li>Memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi dan sarana sosialisasi sebagai salah satu alternatif efisiensi waktu dan keterbatasan personal</li> </ol>
Threats (Ancaman)	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Pemilu di Kabupaten Bogor melalui PPID</li> <li>Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor untuk menekan penyebaran berita <i>hoax</i> melalui teknologi informasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi awal</li> <li>Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi</li> </ol>

Strategi SO menggunakan kekuatan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi WO bertujuan untuk mengurangi kelemahan dengan mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Strategi ST menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT dilakukan sebagai taktik defensif yang dilakukan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.



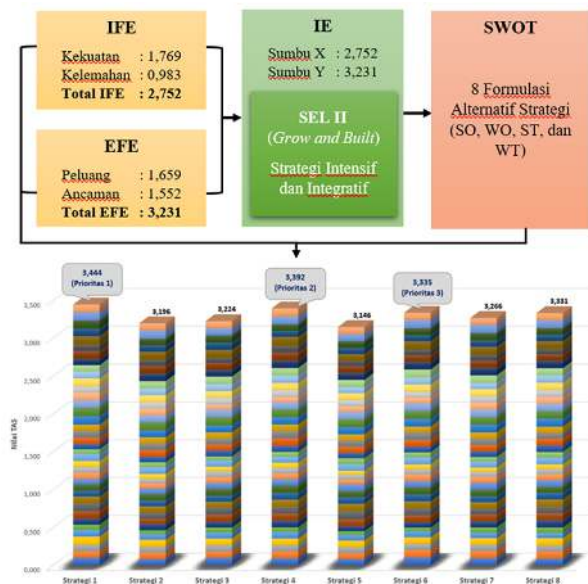
Tahap ketiga adalah tahap keputusan penetapan strategi yang merupakan tahap penentuan strategi yang dinilai paling sesuai untuk diterapkan oleh KPU Kabupaten Bogor berdasarkan hasil analisis tahap pencocokan pada matriks SWOT. Instrumen yang digunakan pada tahap pengambilan keputusan atas berbagai alternatif strategi hasil matriks SWOT adalah teknik Quantitative Strategic Planning Matriks (QSPM) untuk menentukan daya tarik relatif dari tindakan alternatif yang layak. Alternatif-alternatif strategi yang dipertimbangkan untuk dapat diimplementasikan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut:

1. Strategi 1: Menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap perpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya
2. Strategi 2: Menyusun program-program penyampaian informasi dan sosialisasi yang lebih inovatif dengan memanfaatkan keberadaan komunitas dan organisasi masyarakat sebagai agen sosialisasi
3. Strategi 3: Meningkatkan sinergi di lingkungan internal serta mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran muspida lainnya
4. Strategi 4: Memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi dan sarana sosialisasi sebagai salah satu alternatif efisiensi waktu dan keterbatasan personal
5. Strategi 5: Meningkatkan pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat tentang Pemilu di Kabupaten Bogor melalui PPID
6. Strategi 6: Memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor untuk menekan penyebaran berita *hoax* melalui teknologi informasi
7. Strategi 7: Melakukan kajian-kajian atas masalah yang diperkirakan akan timbul dari persepsi yang berbeda atas isi peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan solusi awal
8. Strategi 8: Melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyebaran informasi dan sosialisasi

Tabel 6. Perhitungan prioritas strategi dengan QSPM

Kode Faktor Lingkungan Internal-External	Nilai Bobot	Strategi 1		Strategi 2		Strategi 3		Strategi 4		Strategi 5		Strategi 6		Strategi 7		Strategi 8	
		TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS	TAS	AS
S.1	0,027	0,098	3,00	0,081	3,00	0,098	3,40	0,092	3,00	0,081	3,30	0,103	3,40	0,092	3,20	0,087	
S.2	0,027	0,085	3,20	0,085	3,00	0,080	3,40	0,091	3,00	0,080	3,60	0,096	3,60	0,096	3,60	0,096	
S.3	0,025	0,087	3,00	0,076	3,40	0,087	3,20	0,082	3,00	0,076	3,20	0,082	3,20	0,082	3,20	0,082	
S.4	0,027	0,108	3,40	0,092	3,20	0,087	3,20	0,087	3,20	0,087	3,20	0,087	3,20	0,087	3,20	0,087	
S.5	0,025	0,086	3,00	0,076	3,20	0,081	3,60	0,091	3,00	0,076	3,20	0,081	3,00	0,076	2,80	0,071	
S.6	0,022	0,069	2,20	0,048	3,00	0,065	2,60	0,056	2,20	0,048	2,20	0,048	3,00	0,065	3,20	0,069	
S.7	0,026	0,082	3,40	0,087	3,00	0,077	3,60	0,092	2,60	0,067	2,80	0,072	3,20	0,082	3,40	0,098	
S.8	0,027	0,096	2,40	0,064	3,60	0,096	3,40	0,091	3,40	0,091	3,40	0,091	3,40	0,091	3,40	0,091	
S.9	0,027	0,102	3,00	0,081	3,40	0,091	3,20	0,086	4,00	0,108	3,40	0,091	2,80	0,075	3,20	0,086	
S.10	0,027	0,091	3,20	0,086	2,80	0,075	3,60	0,097	3,60	0,097	3,40	0,091	3,20	0,086	3,40	0,097	
W.1	0,026	0,078	3,00	0,078	3,00	0,078	3,40	0,088	3,40	0,088	3,60	0,093	3,00	0,078	3,40	0,088	
W.2	0,027	0,083	3,20	0,083	3,60	0,096	3,80	0,101	3,00	0,080	3,60	0,096	3,20	0,083	3,00	0,080	
W.3	0,026	0,072	2,80	0,072	3,00	0,077	3,20	0,082	3,60	0,092	3,20	0,082	3,60	0,092	3,40	0,087	
W.4	0,025	0,084	2,80	0,069	3,00	0,074	3,00	0,074	2,40	0,059	3,60	0,089	3,20	0,079	3,20	0,079	
W.5	0,023	0,070	2,40	0,056	3,40	0,079	3,20	0,075	2,80	0,065	2,80	0,068	2,80	0,065	2,80	0,068	
W.6	0,021	0,082	3,00	0,068	2,60	0,059	3,00	0,068	2,20	0,050	2,80	0,064	2,60	0,059	2,80	0,064	
W.7	0,027	0,096	3,40	0,091	3,20	0,085	3,00	0,080	3,40	0,091	3,60	0,096	3,00	0,080	3,40	0,091	
W.8	0,022	0,058	2,80	0,063	2,20	0,049	2,80	0,063	3,40	0,076	2,80	0,063	2,60	0,058	3,20	0,072	
W.9	0,025	0,069	3,00	0,074	3,20	0,079	3,20	0,079	2,80	0,069	3,00	0,074	3,00	0,074	3,40	0,089	
W.10	0,027	0,085	3,40	0,091	3,00	0,080	3,80	0,101	3,20	0,085	3,40	0,091	3,20	0,085	3,40	0,091	
O.1	0,027	0,085	3,40	0,091	3,00	0,080	3,80	0,101	3,20	0,085	3,40	0,091	3,20	0,085	3,40	0,091	
O.2	0,026	0,088	3,20	0,083	3,00	0,078	3,60	0,093	3,00	0,078	3,40	0,098	3,00	0,078	2,80	0,075	
O.3	0,026	0,083	3,20	0,083	3,20	0,083	3,40	0,088	3,20	0,083	3,00	0,078	3,40	0,088	3,20	0,083	
O.4	0,028	0,113	3,20	0,091	3,20	0,091	3,40	0,096	3,40	0,096	3,60	0,102	3,60	0,102	3,40	0,108	
O.5	0,029	0,111	3,80	0,111	3,80	0,111	3,60	0,105	3,60	0,105	3,60	0,105	3,60	0,105	3,40	0,099	
O.6	0,028	0,100	3,20	0,089	3,60	0,100	3,20	0,089	3,40	0,094	3,60	0,100	3,60	0,100	3,40	0,094	
O.7	0,026	0,099	3,60	0,094	2,60	0,068	2,80	0,073	3,00	0,078	3,00	0,078	3,60	0,094	3,40	0,094	
O.8	0,026	0,082	3,00	0,077	3,40	0,087	3,40	0,087	3,20	0,082	2,80	0,072	3,20	0,082	3,40	0,087	
O.9	0,028	0,106	3,40	0,095	3,20	0,089	3,60	0,100	3,20	0,089	3,60	0,100	3,40	0,095	3,60	0,100	
O.10	0,027	0,091	3,40	0,091	3,40	0,091	3,60	0,097	3,00	0,081	3,40	0,091	3,00	0,081	3,40	0,097	
I.1	0,028	0,084	3,40	0,095	3,60	0,100	3,60	0,100	3,40	0,095	3,80	0,106	3,60	0,100	3,40	0,095	
I.2	0,028	0,084	3,60	0,100	3,20	0,089	3,60	0,100	3,40	0,095	3,60	0,100	3,80	0,106	3,60	0,100	
I.3	0,027	0,104	3,80	0,104	3,40	0,093	3,80	0,104	3,20	0,088	3,20	0,088	3,20	0,088	3,40	0,082	
I.4	0,025	0,084	3,20	0,079	2,60	0,064	3,60	0,089	2,80	0,069	3,00	0,074	3,20	0,069	2,80	0,069	
I.5	0,029	0,111	3,60	0,100	3,60	0,108	4,00	0,116	3,00	0,087	3,40	0,111	3,60	0,105	3,40	0,105	
I.6	0,026	0,100	3,20	0,084	3,60	0,095	3,00	0,079	3,20	0,084	3,00	0,079	3,20	0,084	3,20	0,084	
I.7	0,027	0,110	3,20	0,088	3,60	0,099	3,20	0,088	3,20	0,088	3,40	0,093	3,60	0,099	3,20	0,088	
I.8	0,029	0,110	3,80	0,110	3,20	0,092	3,60	0,104	3,20	0,092	3,80	0,110	3,80	0,110	3,40	0,104	
I.9	0,029	0,110	3,80	0,110	3,20	0,092	3,60	0,104	3,20	0,092	3,80	0,110	3,80	0,110	3,40	0,104	
I.10	0,028	0,100	3,40	0,094	3,40	0,094	3,80	0,105	3,40	0,094	3,40	0,094	3,20	0,089	3,40	0,094	
		1	3,444	3,196	3,224	3,224	3,292	3,146	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	3,235	
			1	7	6	2	8	3	5	4							

Gambar 6. Alur penentuan prioritas strategi dengan penghitungan TAS alternatif strategi menggunakan QSPM



Alternatif strategi yang terpilih sebagai alternatif utama atau alternatif prioritas 1 adalah Strategi 1 dengan skor 3,444 yaitu menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap perpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya, hal ini

menjukkan bahwa peraturan dalam bentuk keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan sangat penting untuk mempertegas dan memberikan aturan yang lebih spesifik sesuai dengan keadaan di Kabupaten Bogor serta dapat membuat rencana kerja program-program kegiatan lebih jelas dan terarah termasuk program-program kegiatan untuk peningkatan partisipasi pemilih. Alternatif strategi prioritas kedua yang dapat diimplementasikan adalah Strategi 4 dengan skor TAS 3,392, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dalam menyebarkan informasi dan sarana sosialisasi sebagai salah satu alternatif efisiensi waktu dan keterbatasan personil. KPU Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai pemilihan dan sebagai sarana sosialisasi dengan jangkauan yang luas secara serentak dalam waktu yang singkat, sehingga KPU Kabupaten Bogor dapat mengefisienkan jumlah personil dan waktu yang terbatas jadwal tahapan. Alternatif strategi prioritas ketiga dengan skor TAS 3,335 adalah Strategi 6, yaitu memperbanyak kegiatan sosialisasi secara tatap muka di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor untuk menekan penyebaran berita hoax melalui teknologi informasi. Penyebaran informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi juga harus diiringi dengan kegiatan tatap muka terutama dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di KPU Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 berdasarkan keadaan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, maka diperoleh kesimpulan, yaitu: 1) Identifikasi lingkungan KPU Kabupaten Bogor terdiri dari lingkungan internal dan eksternal yang menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Identifikasi lingkungan internal menghasilkan 10 faktor kekuatan dan 9 faktor kelemahan yang dituangkan dalam matrik IFE dengan total skor 2,752 dan identifikasi lingkungan eksternal menghasilkan 9 faktor peluang dan 10 faktor ancaman yang dituangkan dalam matrik EFE dengan total skor 3,231, sehingga posisi KPU Kabupaten Bogor pada Matrik IE berada pada sel II, yaitu grow and build dengan rumusan strategi yang sesuai adalah strategi intensif dan integrative; 2) Hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal

dianalisis dengan menggunakan SWOT dan menghasilkan delapan alternatif strategi yang terdiri dari masing-masing 2 alternatif strategi untuk strategi SO, WO, ST, dan WT; 3) Strategi yang dapat diimplementasikan sebagai hasil penghitungan nilai atraktif setiap alternatif strategi melalui QSPM, menghasilkan strategi utama dengan nilai TAS 3,444 yaitu menyusun keputusan-keputusan teknis penyelenggaraan pemilihan yang disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di atasnya. KPU Kabupaten Bogor diharapkan dapat memperkuat dan memperjelas setiap program kerja melalui keputusan-keputusan teknis yang telah disesuaikan dengan keadaan di Kabupaten Bogor, sehingga program-program dari KPU RI dan KPU Provinsi yang sifatnya general dapat diatur lebih spesifik dan terarah baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, termasuk untuk program kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Tahun 2019. Selain itu KPU Kabupaten Bogor juga hendaknya lebih cepat meng-update berita/informasi pada web resmi KPU Kabupaten Bogor, sehingga masyarakat dapat menegatahui informasi terbaru dari sumber terpercaya. Selain itu, penyampaian informasi secara digital juga sebaiknya diimbangi oleh kegiatan sosialisasi tatap muka dengan memaksimalkan jadwal tahapan sosialisasi dan tetap memperhatikan jumlah pegawai dan urgensi kegiatan tahapan lain.

### Referensi

- Bakri. Politik dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian. [Internet]. Diakses pada 16 Agustus 2018. Tersedia pada: <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/26/politik-dan-pengaruhnya-terhadap-perekonomian>.
- Budiardjo M. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
- David FR, David FR. 2015. *Manajemen Strategik: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep*. Ed ke-15. Jakarta (ID): Salemba Empat.
- Kurniawan E, Haikal AM. 2016. *Membangun Kompetensi Dasar Kepemiluan untuk Komunitas Seri Modul Pelatihan*. Jakarta (ID): Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- [KPU] Komisi Pemilihan Umum. 2014. *Partisipasi Pemilih Pemilu 2014 dalam*

- Angka*. Jakarta (ID): Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Muhammad S. 2013. *Strategi Pemerintah: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Munandar JM, *et al.* 2014. *Pengantar Manajemen Panduan Komprehensif Pengelolaan Organisasi*. Bogor (ID): IPB Press.
- Nimmo D. 2010. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung (ID): Remaja Rosda Karya.
- [Pekab Bogor] Pemerintah Kabupaten Bogor. 2017. *Kependudukan*. [Internet]. Diakses pada 1 Agustus 2018. Tersedia pada <http://bogorkab.go.id/index.php/page/detail/17/kependudukan#.W2wOYegzZEY>.
- Purnomo SH, Zulkieflimansyah. 2007. *Manajemen Strategi*. Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Rangkuti F. 2013. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2010. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Surbakti R. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta (ID): Grasindo.
- Umar H. 2008. *Strategic Management in Action*. Yogyakarta (ID): Kanisius.
- Wahid U. 2016. *Komunikasi Politik Teori, Konsep, dan Aplikasi pada Era Media Baru*. Bandung (ID): Simbiosis Rekatama Media